

Peran Industri Strategis dalam Mendukung Ketahanan Nasional Melalui Peningkatan Perekonomian Nasional

Upi Sopiah Ahmad^{1*}, Ayu Sri Hartika²

¹ Ekonomi Syariah, IAIN Takengon, Aceh, Indonesia

*opisopiahahmad@gmail.com

ABSTRACT

These studies were carried out through a qualitative method using analytical description techniques because the record set collected is presented regularly and in detail. A study like this one shows the expansion of the defense sector controls around 20% of all TPT products in Indonesia. Implementing KLO, collaborating internationally, and promoting the military sector are all part of the development from the defense sector, defense industry licensing, BU Handak, the Defense Technology and Industry Development Program, and seven other programs of national importance as well as the Strategic Sector Position of Sritex to strengthen the country's economy to sustain resilience. In addition, the Innovation model that Drives improvement of the Defense Strategic Industry can help the growth strategy for defense enterprise. Domestic sales usually account for 60% of sales, while exports account for 40%. Sritex is also a leading partner worldwide in providing military, public authority and professional uniforms greater than 30 nations, eight of which are European countries such as Germany, UK, Austria, Norway, Sweden and three other European countries. defense industry in an effort to encourage strategic industry progress in the defense sector, such as market for the defense sector characteristics, technological innovation, key variables for among other achievements, technical innovation. Strong principles are needed to make it happen.

Keywords: Strategic Industry; National Economy; Defense.

ABSTRAK

Studi ini menunjukkan bahwa pengembangan industri pertahanan menguasai sekitar 20% dari seluruh produk TPT di Indonesia. Pengembangan industri pertahanan mencakup pelaksanaan klo, kerja sama internasional, promosi industri pertahanan, perizinan industri pertahanan, bu handak, program pengembangan teknologi dan industri pertahanan, dan 7 (tujuh) program prioritas nasional dan peran industri strategis sritex untuk meningkatkan perekonomian nasional untuk mendukung ketahanan nasional. Selain itu, model inovasi inovasi yang mendorong kemajuan industri strategis pertahanan dapat membantu pertumbuhan industri strategis pertahanan. Penjualan domestik biasanya mencapai 60% dari penjualan, sedangkan ekspor 40%. Sritex juga menjadi mitra terkemuka di seluruh dunia dalam menyediakan seragam militer, otoritas publik, dan profesional ke lebih dari 30 negara, delapan di antaranya adalah negara-negara eropa seperti Jerman, Inggris, Austria, Norwegia, Swedia, dan tiga negara eropa lainnya terkait inovasi dalam industri pertahanan dalam upaya mendorong kemajuan industri strategis di bidang pertahanan, seperti karakteristik pasar industri pertahanan, inovasi teknologi, faktor keberhasilan inovasi teknologi, dan inovasi lainnya. Sangat diperlukan prinsip-prinsip yang kuat untuk mewujudkannya.

Kata kunci: Industri Strategis; Perekonomian Nasional; Ketahanan.

PENDAHULUAN

Dengan liberalisasi jugaglobalisasi bergerak cepat, ekonomi nasional sangat terpengaruh. Di satu sisi, itu menciptakan peluang baru bagi perusahaan, dan di sisi lain, meningkatkan persaingan. Sudah banyak diketahui orang-orang bahwa sektor industri memainkan peran yang sangat dibutuhkan dalam perekonomian nasional, terkhusus pada perannya sebagai penggerak, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Lebih sempit lagi, sektor industri memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan, selain menyediakan lowongan kerja bagi masyarakat dan menghasilkan devisa bagi negara.

Karena karakteristik industrinya, banyak cabang memiliki fungsi strategis bagi negara dan negara Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, pemahaman strategis seseorang sangat berubah seiring dengan pertumbuhan lingkungan strategis di regional serta internasional. Karena itu, definisi strategis mungkin menjadi perdebatan. Namun, dalam situasi ini, seluruh pemangku kepentingan nasional harus mencapai kesepakatan untuk menentukan industri strategis yang akan membantu pertumbuhan ekonomi bangsa. Industri pertahanan adalah salah satu sektor industri strategis di Indonesia karena menunjukkan teknologi dan inovasi yang ada di setiap tahapan proses produksi. Selain itu, industri pertahanan juga berfungsi sebagai salah satu sektor industri strategis yang memiliki kapasitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Ekonomi nasional bergantung pada pertahanan, tetapi untuk mencapainya diperlukan kerja sama dan komitmen jangka panjang dari semua pihak. Data impor alutsista Indonesia yang dirilis Bank Dunia pada tahun 2021 menunjukkan tren yang tampaknya berubah dalam lima tahun terakhir. Nilai impor tahunan meningkat 24,42% pada tahun 2020 menjadi US\$ 270 juta, dan mencapai titik tertingginya pada tahun 2017 menjadi US\$ 1.171 juta. Di sisi lain, nilai ekspor alutsista Indonesia juga berubah, dengan nilainya pada tahun 2021 mencapai US\$ 1.171 juta.

Meskipun impor alutsista Indonesia masih tinggi dan tidak sebanding dengan ekspornya, hal ini tidak menghentikan Indonesia untuk mencapai kemandirian industrinya sendiri. Metode alih teknologi dari proses impor alutsista diharapkan dapat memenuhi kebutuhan teknologi terapan dalam membangun alutsista di dalam negeri.

Karena peran strategisnya dan karakteristiknya yang berbeda, sektor pertahanan, baik BUMN maupun BUMS, terus diupayakan untuk dikembangkan dari pangkal hingga

ujung. Terdapat pada Legislasi Nomor 16 Tahun 2012, pemerintah menetapkan tujuan industri pertahanan, fungsi, dan ruang lingkup. Penataan ini pada dasarnya bagian dari usaha pemerintah dalam konteks memperkuat industri pertahanan untuk memenuhi permintaan dan layanan pemeliharaan kontributor nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang melibatkan analisis deskriptif karena data yang dikumpulkan diuraikan secara rinci dan teratur. (Bugin, 2005 : 29).Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif penelitian deskriptif di mana pendekatan mereka melalui fitur, atribut, dan penjelasan cerita untuk memastikan penelitian ini benar. Penelitian metode kualitatif adalah untuk mempelajari serta mengetahui hubungan antara seorang individu atau kelompok dengan masalah manusia atau sosial. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif mempelajari budaya kelompok dan menemukan bagaimana pola perilaku penduduk berubah secara historis. Salah satu bagian penting dari pengumpulan data adalah melihat bagaimana masyarakat bertindak dan terlibat dalam aktivitas tersebut. Penelitian kualitatif menggunakan pengumpulan, analisis, dan interpretasi angka yang rumit. Data sekunder adalah sumber data untuk penelitian ini. (Fauzi, 2022 : 13)

Data sekunder juga disebut sebagai data primer yang memiliki proses lanjutan dan disediakan oleh bagian lain atau oleh pengumpul data primer disebut data sekunder. Karya ilmiah, seperti artikel, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian, dimana hal tersebut merupakan contoh dari jenis data yang digunakan oleh peneliti pada tahap proses selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri Strategis

Berdasarkan UU No 3 tahun 2014 mengenai Perindustrian, khususnya pasal 1 ayat 2, Industri dapat diartikan semua aktivitas perekonomian meliputi mengolah bahan mentah sampai menggunakan sumber daya industri untuk penciptaan produk dengan hasil lebih baik dimana berdasarkan kegunaan yang maksimal, termasuk jasa industri. (Muhammad, 2018 : 13).

Istilah "industri" mengacu pada total jumlah perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah tertentu. Ada kemungkinan bahwa agregasi ini didasarkan pada kriteria sisi

permintaan (berbasis pasar) dan dan komponen tambahan (berbasis teknologi). Berdasarkan sisi permintaan, industri diklasifikasikan berdasarkan sisi permintaan, yaitu dengan membagi bisnis yang menghasilkan barang dengan elastisitas harga silang, juga disebut elastisitas silang, yang melebihi batas tertentu, seperti lebih besar dari dua, yang menunjukkan bahwa produk tersebut merupakan pengganti. Salah satu kelebihan dari metode ini ialah bahwa kita dapat memahami bagaimana pelanggan mengubah produk tertentu, terlepas dari teknologi pada saat dipakai diperkirakansama. Contohnya, mobil jenis APV merk "A" berbeda seperti barang yang disimbilkan "X" dan mobil jenis APV merk "B" berbedajugabarang yang ditulis "Y" (Indah, 2018 : 1-3). Sementara kedua produk ini hampir identik secara teknologi dan memiliki harga yang tidak jauh berbeda, mereka dibuat di pabrik yang berbeda serta memenuhi segmen pasar yang berbeda. Akan sulit untuk menghitung elastisitas harga silang karena harga sangat berbeda. Contoh nyata dari mobil jenis ini dapat ditemukan. Mobil-mobil ini dibuat oleh berbagai merek dan seri.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 atas Penyelenggaraan Bidang Industri, industri strategis dianggap penting bagi negara dan bertanggung jawab untuk menghasilkan nilai tambahan strategis dari sumber daya alam, mengontrol kebutuhan hidup masyarakat, atau berhubungan dengan pertahanan. Ketentramannasional untuk memenuhi kewajiban negara. negara menguasai industri strategis melalui: (1) Skema kepemilikan (2) Penentuan kebijakan (3) Pengaturan izin; (4) Pengaturan harga, distribusi, dan produksi; dan pengawasan.

Untuk mengatur kepemilikan industri strategis, digunakan metode berikut: (1) Penyertaan modal penuh pemerintah; (2) Pembentukan perusahaan patungan pemerintah-swasta; atau (3) Pembatasan kepemilikan investor asing.

Ada sejumlah variabel yang terkait dengan variasi dalam kemampuan teknologi (T) begitu pula inovasi (In), selanjutnya laju pertumbuhan PN berdasarkan indikator per individu tambahan turut memengaruhi tingkat industrialisasi setiap negara (Efendi, 2021 : 96-97). Faktor tambahan ini dapat dijelaskan berikut :

- (1) Kondisi ekonomi awal negara dan strukturnya. Suatu negara yang memiliki industri dasar, juga dikenal sebagai industri primer atau hulu, pada awal pembangunan atau industrialisasi ekonominya, seperti: (a) Logam dan baja

(b) Semen (c) Petrokimia. (d) Perusahaan tengah, atau antara pangkal hingga ujung/pusatnya.

Lebih cepat daripada negara yang secara eksklusif memiliki sektor hilir ringan seperti pakaian, makanan, dan minuman. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa negara dengan industri hulu dan tengah yang kuat akan menjadi lebih mudah untuk membangun industri utamamelalui tingkat diversifikasi produksi berkategori relatif tinggi.

Pasar lokal secara keseluruhan ditentukan oleh gabungan dari jumlah penduduk serta standar pendapatan nyataper orang, pasar domestik dalam kategori besar, seperti Indonesia, memiliki populasi melebihi dua ratus juta individu, tetapi memiliki tingkat penghasilan per orang yang lumayan rendah dibandingkan dengan negara lain, berfungsi sebagai katalisator untuk pertumbuhan bisnis, termasuk industri. Untuk mencapai produksi yang ideal, ekspor adalah alternatif jika pasar domestik kecil. Ekspor, bagaimanapun, sulit, terutama pada tahap awal pembangunan ekonomi.

Ciri industrialisasi mencakup berbagai aspek pelaksanaan industrialisasi, seperti jenis industri kategori prioritas, pola pembangunan industri, dan termasuk insentif untuk penanam modal.

Adanya kekayaan Sumber Daya Alam (SDA): Negara makmur akan kekayaan alam biasanya memiliki tingkat diversifikasi dan tingkat kemajuan ekonomi yang lebih menurun. Mereka juga cenderung terlibat dalam industrialisasi lebih lambat ataupun tidak sama sekali jika dibandingkan dengan negara dengan hasil bumi yang tidak terpenuhi.

Strategi juga kebijakan pemerintah yang melaksanakan, yang mencakup alat kebijakan yang digunakan dan dilaksanakan, seperti cuti pajak, bea masuk gratis untuk impor komponen dan bahan baku tertentu, pinjaman dengan bunga rendah, serta zona pemrosesan ekspor atau wilayah yang tidak terlibat dalam perdagangan. Negara-negara yang menerapkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan industri melalui kebijakan perdagangan internasional yang melindungi dan menggantikan impor (seperti yang terjadi di Indonesia selama masa pemerintahan orde baru pada saat sebelum krisis) memiliki pola industrialisasi tidak sama dari negara-negara yang melaksanakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan industri melalui ekspor.

Perekonomian Nasional

Negara berfungsi sebagai pusat untuk semua aktivitas masyarakat dan pemerintahan, seperti menyediakan juga operasi pembangunan, ekonomi, transportasi, perdagangan, politik, dan sebagainya. Tujuan dari Republik Indonesia dinyatakan melalui alinea keempat Pembukaan UUD 1945.: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi konflik bangsa Indonesia dan menumpahkan darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menanggung dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia" (Assiddiqie, 2004 : 34-35).

"Memajukan kesejahteraan umum" sebagai sasaran utama pendirian negara Indonesia. Oleh karena itu, bidang ekonomi sangat terkait dengan kesejahteraan umum, dan tanggung jawab atas program-program yang berkaitan dengan bidang ekonomi yang dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kemakmuran rakyat, dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan umum.

Industrialisasi yang lamban menghambat transformasi ekonomi Indonesia dari perekonomian agraris ke industri. Ada kemungkinan bahwa pertumbuhan industri domestik yang sangat tangguh akan menghadapi pengejaran laba cepat yang diperoleh melalui kegiatan yang mirip dengan "makelar", yang berarti menjual barang impor. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pasar bebas telah merugikan negara-negara dengan industri yang tertinggal, seperti Indonesia. Orang-orang dan para pebisnis Indonesia telah menikmati barang impor murah yang semakin bebas masuk ke negara mereka. Negara Indonesia hanya memiliki dua pilihan: menjadi "bangsa konsumen" atau "bangsa makelar" karena proses industrialisasi yang lamban dalam sistem pasar bebas. Salah satu faktor utama yang menyebabkan industrialisasi di Indonesia tertunda dalam sistem pasar bebas adalah konsentrasi industri yang tinggi. Banyak orang khawatir bahwa industri di Indonesia, yang berkembang sebagai akibat dari berbagai insentif atau persaingan yang tidak adil, akan kalah dari industri yang lebih efisien dari luar. Selain itu, terbukti bahwa industri model ini tidak tahan terhadap pergeseran ekonomi domestik dan internasional. Struktur pasar yang terdiri dari monopoli dan oligopoli, dan kartel yang berdampak dari penguatan teknologi, hak paten, merger, dan kapasitas

produksi yang besar. Ini menyebabkan konsentrasi industri dari sisi produsen dan penjual. Dalam kapasitas mereka sebagai konsumen, masyarakat Indonesia harus membayar harga tinggi untuk produk, akan dirugikan oleh konsentrasi industri yang dihasilkan oleh kolusi dan fasilitas. Karena persaingan di sektor ini yang menurun juga dan kemungkinan kegagalan, pasar domestik akan jatuh ke tangan produsen negara lain, hal ini juga akan berdampak negatif pada ekonomi nasional dalam jangka panjang. Perekonomian negara akan mengalami inefisiensi sebagai akibat dari konsentrasi karena alasan di atas. Industri tidak akan dapat menurunkan harga produksi sepenuhnya, dan mereka akan tetap membutuhkan perlindungan pemerintah dari pesaing asing dan memiliki tingkat ekspor yang rendah (Ika, 2020 : 40). Jika konsentrasi industri disebabkan oleh kebijakan pemerintah, kebijakan harus diubah untuk memberikan peluang bagi pelaku industri domestik baru untuk masuk. Namun, jika konsentrasi disebabkan oleh kolusi, atau kerja sama yang tidak adil, maka pelakunya harus diberikan sanksi yang kuat.

Dalam keadaan ini, perlu dijamin bahwa produk undang-undang seperti UU Anti-Monopoli, yang berfungsi untuk mencegah aturan main, termasuk persaingan yang tidak sehat akan berfungsi dengan baik (Ika, 2020 : 40-41). Itu pasti termasuk mengoptimalkan fungsi institusi yang mengawasi sistem dan struktur yang mengawasi persaingan bisnis, seperti diimplementasikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia.

Pertahanan Negara

Semua warga negara Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 mengutarakan bahwasanya rakyat memiliki hak serta wajib berpartisipasi pada pelaksanaan pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menegaskan selain memiliki hak juga harus untuk melindungi keamanan negara, setiap penduduk berhak dan wajib mengambil bagian pada lingkup usaha pertahanan bangsa.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1255/M/XII/2015 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016, Bela Negara umumnya adalah segala bentuk pertahanan universal, universal, dan teritorial. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan negara meliputi semua

ikhtir untuk menjaga kemerdekaan, keutuhan serta keamanan negara, juga seluruh bangsa dari ancaman, gangguan dari kedaulatan negara satu serta negara lain. Sistem pertahanan bangsa adalah semesta yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis, terkoordinasi, terus menerus menjaga keamanan, kedaulatan, dan integritas seluruh negara yang aman dari semua peseteruan berpoensi mengancam. penduduk, wilayah, serta sumber daya tambahan, termasuk pada sistem pertahanan nasional (Ryacudu, 2015 : 64-68). Segala kegiatan yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan pertahanan disebut penyelenggaraan pertahanan negara.

Pengembangan Industri Pertahanan Strategis untuk Menghadapi Persaingan Dunia

Dalam beberapa kebijakannya, Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, menerangkan mengenai mewujudkan industri pertahanan yang mandiri dan mengubah perspektif dari belanja pertahanan ke investasi pertahanan.. Ini terkait dengan cara mengembangkan sektor pertahanan Indonesia, sehingga perlu ada pergeseran dari belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan transfer teknologi sangat diperlukan.

Di bidang industri pertahanan, Visinya adalah Indonesia yang maju, merdeka, dan berdaulat yang didasarkan pada solidaritas. Di sisi lain, di bidang industri pertahanan, Misi mereka adalah Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang didasarkan pada solidaritas. Untuk sementara waktu, hal-hal berikut adalah prioritas nasional:

- 1) Indonesia Maju akan menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan memiliki budaya kolektif.
- 2) Untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan pemerataan, wilayah dibangun.
- 3) Meningkatkan kompetitifitas sumber daya manusia.
- 4) Perkembangan budaya dan transformasi mental.
- 5) Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta pelayanan dasar.
- 6) Membangun lingkungan, mengatasi perubahan iklim, dan meningkatkan ketahanan bencana.
- 7) mengubah pelayanan publik dan meningkatkan stabilitas pemerintahan, hukum, keamanan, dan pertahanan..

Peraturan No. 03 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan membentuk dasar hukum untuk industri pertahanan. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden juga mengatur industri pertahanan. (Ryacudu, 2015 : 66). Didasarkan pada kebutuhan pengguna dan dinamika ancaman, pengembangan teknologi pertahanan di industri pertahanan berfokus pada strategi, teknologi tinggi, jangka panjang, kelayakan ekonomi, transfer teknologi, dan lintas pemerintahan dan kementerian/lembaga. Strategi penguasaan teknologi pertahanan mencakup:

- 1) Partisipasi Industri Pertahanan: Penerapan trade balance, local content, and offset (IDKLO) dalam pengadaan alutsista internasional menunjukkan penguasaan teknologi.
- 2) Kerjasama Luar Negeri: Penguasaan teknologi dapat dicapai melalui kerjasama dengan negara lain dalam bentuk sinergi pembangunan, produksi, dan usaha bersama.
- 3) Litbangyasa Nasional: Program R&D bagi pengguna dan industri alat utama diatur oleh KKIP untuk meningkatkan penguasaan teknologi.

Industri pertahanan termasuk alat inti, komponen inti, dan/atau komponen pendukung, bahan baku, dan bagian industri atau pendukung; Perizinan dan BU Handak; Kerjasama Luar Negeri; Pembinaan Industri Pertahanan; dan Program Pengembangan Industri dan Teknologi Pertahanan. Selain itu, pembangunan industri pertahanan termasuk 7 (tujuh) Program Prioritas Nasional.

Peran Industri Strategis Sritex untuk Mendukung Ketahanan Nasional Melalui Peningkatan Perekonomian Nasional

Sritex adalah industri tekstil padat karya yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Produknya dibuat atau dikerjakan oleh Sritex. Semua operasi, mulai dari bahan mentah hingga produk akhir, dilakukan dalam satu perusahaan. Sritex memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk berkualitas internasional yang dapat diterima di dalam negeri. menghentikan impor dan mengembangkan produk lokal untuk membanggakan masyarakat Indonesia sambil tetap memprioritaskan kualitas produk.



Sritex memiliki kemampuan untuk mengontrol dan memastikan standar kualitas material karena perusahaan terintegrasi dari proses awal bahan mentah hingga bahan jadi. Berdasarkan data kontribusi keseluruhan, baik ekspor maupun domestik, Sritex menguasai 20% dari produk tekstil Indonesia. Penjualan domestik sekitar 60% dan ekspor 40%.

Sritex mempekerjakan 50.000 orang, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka bekerja di berbagai wilayah Jawa Tengah seperti Solo, Sukoharjo, Boyolali, Karang Anyar, Magelang, Semarang, Kudus, dan lainnya. Selain itu, Sritex mendukung dan bekerja sama dengan lebih dari 100 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), termasuk UMKM konveksi, penyedia asesoris, penyedia *spare part*, dan UMKM kemasan. Pendapatan Sritex telah meningkat 8,52% selama pandemi 2020, mencapai USD 1 miliar sejak 2018. Ini adalah bukti kontribusi perusahaan terhadap pendapatan negara selama empat tahun terakhir.

Sritex juga menjadi mitra terkemuka di seluruh dunia dalam menyediakan seragam militer, otoritas publik, dan profesional ke lebih dari 30 negara, delapan di antaranya adalah negara-negara Eropa seperti Jerman, Inggris, Austria, Norwegia, Swedia, dan tiga negara Eropa lainnya. Selain itu, Sritex adalah mitra resmi di luar Eropa untuk membuat seragam militer untuk *The North Atlantic Treaty Organization* (NATO).

KESIMPULAN

Dalam menghadapi persaingan global, ada beberapa kebijakan yang membantu industri pertahanan menjadi independen dan mengubah perspektif tentang pertahanan sebagai investasi daripada pembelanjaan. Industri pertahanan termasuk alat inti, komponen inti, dan komponen pendukung, bahan baku, dan industri komponen atau penunjang; perizinan dan handak BU untuk industri pertahanan; program pengembangan industri pertahanan dan teknologi; dan 7 (tujuh) Program Prioritas Nasional.

Peran Industri Strategis Sritex untuk Meningkatkan Perekonomian dan Mendukung Ketahanan Nasional Sritex menguasai sekitar 20% dari semua produk tekstil di Indonesia, menjadikannya industri tekstil padat karya dan perusahaan terpadu dengan bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir. Penjualan domestik biasanya 60% dan ekspor 40%. Inovasi dalam industri pertahanan dapat mencakup berbagai model, termasuk inovasi produk: penciptaan produk atau jasa baru ditingkatkan secara signifikan dalam hal fitur atau kegunaan yang dimaksudkan. Inovasi program: penerapan sistematis produksi sampai pengiriman yang diperbarui. Ini termasuk kemajuan signifikan dalam teknik, peralatan, *software*, spesifikasi teknis, perangkat lunak, komponen dan material yang digabungkan, keramahan pengguna, hingga karakteristik fungsional lainnya. Inovatif pemasaran: penerapan mekanisme pemasaran baru yang melibatkan perubahan besar dalam desain atau kegunaan.

REFERENSI

- Ali, Muhammad. 2018. *Manajemen Industri 4.0*. Yogyakarta : UNY Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Bugin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Prenada Media.
- Efendi, Joni. 2021. *Diktat Bahan Ajar: Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Universitas Persada Indonesia
- Edwin Basmar. Dkk. 2021. *Ekonomi Pembangunan Strategi dan Kebijakan*. Jakarta: Kita Menulis

F. Harry Sampurno- Kuffal. 2011. *Keruntuhan Industri Strategis Indonesia*. TT: Khajanah Bahari

Fauzi, Ahmad. 2022. *Metodologi Penelitian*. Jawa Tengah : CV Pena Persada Redaksi.

I Nyoman Tingkes. 2021. *Manajemen Strategi di Era Revolusi Industri 4.0*. Sleman: Deepublish Store

Ika, Fahrika, Andi. 2020. *Perekonomian Indonesia Sejarah Dan Perkembangannya*. Makassar : Yayasan Barcode.

Indah, Nikensari, Sri. *Ekonomi Industri : Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta : Samudra Biru.

Nugraha Pranadita. 2018. *Perumusan Strategi Perusahaan Interaksi Hukum dengan Manajemen Strategis dalam Industri Pertahanan Indonesia*. Sleman: Deepublish

Retina Sri Sedjati. 2015. *Manajemen Strategis*. Sleman: Deepusbilish

Ryacudu, Ryamizard. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta : Kementrian Pertahanan Republik Indonesia.

Sri Wahyuni. 2021. *Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus*. Jakarta: Salemba Empat

Suharman. 2019. *Stretegi Pengembangan Industri Barang Jadi Karet*. Yogyakarta: Deepublish Store